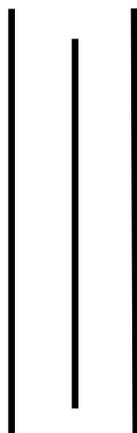




**RENCANA KERJA
(RENJA)
KECAMATAN PORSEA
KABUPATEN TOBA
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN TOBA
KECAMATAN PORSEA
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2022.

RENJA Kecamatan Porsea merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Porsea.

Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2023, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Porsea. 2022

CAMAT PORSEA

**ROBERT MANURUNG, SH
PEMBINA TK.I
NIP. 19690227 199402 1 001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karuniaNya, sehingga dapat disusun Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Tahun 2022.

RENJA Kecamatan Porsea merupakan dokumen Perangkat Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional yang diaplikasikan ke dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah. RENJA Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dna pendanaan sesuai tugas dan fungsi PD yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tersusunnya RENJA ini disamping sebagai dokumen perencanaan, juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/kegiatan Kecamatan Porsea.

Akhirnya kami ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran dalam Penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022, semoga bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

Balige,

2021

BUPATI TOBA

Penanggung Jawab	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Camat	
Sekcam	
Kasi/ Kasubbag	
Staf	

Ir. POLTAK SITORUS

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud Dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	5
BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah	10
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	12
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	13
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	14
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	15
3.3. Program dan Kegiatan	15
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	19
BAB V. PENUTUP .	20

DAFTAR TABEL

TABEL T-C.29.	Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Kantor Camat Porsea Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2021 Kabupaten Toba
TABEL T-C.30.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kantor Camat Porsea Kabupaten Toba
TABEL T-C.31.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Prakiraan Maju Tahun 2023
TABEL T-C.33.	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Toba
TABEL 4.1 .	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 Kabupaten Toba

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Dokumen RENJA Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RENSTRA masing-masing Organisasi Perangkat Daerah. Dokumen RENJA ini merupakan rencana penjabaran kegiatan tahun 2022 Kecamatan Porsea, dimana dalam penyusunannya tentu saja berpedoman pada RPJMD Kabupaten Toba tahun 2021 – 2026.

Untuk itu, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa untuk mempersiapkan rencana pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2022 diawali dengan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disertai dengan penyusunan Rencana Kinerja (RENJA) Perangkat Daerah tahun 2022.

Renja Kecamatan Porsea tahun 2022 ini memuat Program, Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang disertai Indikator Kinerja dan Pendanaan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan juga mempedomani hasil evaluasi Renja Tahun lalu.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Porsea Tahun Anggaran 2022 ini, Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4321);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 114);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Keputusan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

22. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 - 2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Samosir Tahun 2006 - 2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2016 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
26. Peraturan Bupati Toba Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022;
27. Keputusan Bupati Toba Samosir Nomor 213 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Wewenang Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati Toba Samosir kepada Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Toba Samosir.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud disusunnya RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2022 ini dimaksudkan untuk merumuskan program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Porsea selama satu tahun. Dirumuskan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Toba yang disusun dengan akuntabel, partisipatif, kreatif dan tepat sasaran.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Renja Kecamatan Porsea bertujuan :

1. Sebagai input (masukan) dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun ke depan.
2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Toba Samosir khususnya Kecamatan Porsea.

3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan.
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kecamatan berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Porsea Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat Gambaran Umum penyusunan RENJA Kecamatan Porsea yang memuat Substansinya pada Bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik yang terdiri dari, Latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penyusunan Renja ini dibuat.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU.

Bab ini memuat Evaluasi Pelaksanaan RENJA OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisis Kinerja Pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun lalu dan pencapaian Kinerja Renstra Kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat Tujuan, sasaran DAN Kegiatan dari Renja Kecamatan Porsea.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat Program dan Kegiatan yang memuat Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Lokasi Kegiatan, Kebutuhan Dana Indikatif dan Sumber Dana untuk Tahun 2022

BAB V PENUTUP

Bab ini berupa uraian penutup yang memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan maupun rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan RENJA dan capaian RENSTRA Perangkat Daerah merupakan tolak ukur sejauh mana program dan kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Evaluasi capaian kinerja sangat diperlukan untuk dapat mengetahui apakah realisasi program dan kegiatan sudah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan atau belum, bahkan melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Evaluasi capaian kinerja tahun lalu diperlukan atau digunakan untuk perbaikan perencanaan dan kinerja tahun berikutnya sehingga capaian kinerja Perangkat daerah dapat meningkat sesuai yang direncanakan dan diharapkan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Porsea Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kecamatan Porsea Tahun 2021 pada Tabel T-C.29. berikut:

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian Rencana strategis kinerja pelayanan yang memuat output / target kinerja dari indikator kinerja.

Target dan Indikator Kinerja Kecamatan Porsea adalah sebagai berikut :

- a. Cakupan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dengan indicator kinerja ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD, Cakupan ketersediaan administrasi Keuangan OPD, cakupan ketersediaan administrasi Perkantoran, jumlah pengadaan barang milik daerah yang tersedia untuk menunjang kinerja Aparatur, jumlah dukungan jasa penunjang kegiatan aparatur dan persentase barang milik daerah/asset dalam kondisi baik
- b. Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public dengan indicator kinerja cakupan kegiatan Pemerintah di Wilayah Kecamatan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan, jumlah urusan Pemerintahan yang hak dan wewenangnya tanggungjawab Kecamatan, jumlah prasarana dan fasilitas umum yang berfungsi dengan baik.
- c. Persentase Pembangunan di Kecamatan yang dikoordinasikan dengan indicator kinerja jumlah kegiatan Pemerintah di bidang Pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan dan difasilitasi, meningkatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dan pemberdayaan kelompok masyarakat Kelurahan dan jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina
- d. Berkurangnya kasus complain/pengaduan masyarakat akan ketertiban umum dengan indicator kinerja jumlah koordinasi kegiatan dan penanganan di bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta pengurangan kasus complain/pengaduan masyarakat akan ketertiban umum
- e. Cakupan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Umum dengan indicator kinerja Jumlah kegiatan pemantapan Wawasan Kebangsaan dan Kehidupan Beragama
- f. Cakupan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan kelurahan dengan indicator kinerja jumlah kegiatan Pemerintah Desa/ Kelurahan yang terkoordinasi dan terfasilitasi

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Porsea meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yaitu :

Lingkungan Internal

Streght / Kekuatan :

1. Visi dan Misi Organisasi yang jelas;
2. Titik tolak Kinerja yang jelas dengan adanya target kinerja melalui indikator kinerja;
3. Perjanjian / penandatanganan fakta Integritas antara Bupati Toba dengan Camat dalam pelaksanaan target kinerja;
4. Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan dan Kelurahan;
5. Kewenangan Koordinasi di Tingkat Kecamatan;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Kewenangan Desa dalam pengelolaan Pemerintahan Desa dengan alokasi Dana Desa yang cukup besar.

Weakness / Kelemahan :

1. Penguasaan dan kemampuan SDM Aparatur Pemerintah Kecamatan dan Desa dalam pengelolaan administrasi Pemerintahan dan Pelayanan public perlu ditingkatkan dengan berbasis teknologi dan aplikasi.
2. Pengelolaan SDM Aparatur Desa dalam pengelolaan Pemerintahan dan Keuangan Desa yang perlu ditingkatkan;
3. Lemahnya pelaksanaan koordinasi dengan pemerintahan Kabupaten dan Instansi teknis lainnya;
4. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi Organisasi
5. Belum optimalnya penyusunan kebijakan dan perencanaan.

Lingkungan Eksternal

Opportunity / Peluang :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba tahun 2021- 2026;
2. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan sosial dan akuntabilitas pemerintahan;
3. Komitmen dan kebijakan Bupati untuk memberdayakan masyarakat, dan peningkatan sarana dan prasarana wilayah dan peningkatan pelayanan publik;

4. Posisi / letak Kecamatan Porsea yang strategis yang berada di jalur Lintasan Jalan Negara dan dekat dengan Perusahaan besar / Nasional;
5. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan kecamatan;
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat yang beraneka ragam dengan mengandalkan Budaya Batak berupa Dalihan Natolu dan Batak Na'Raja;
7. Keamanan dan ketertiban masyarakat yang senantiasa terjaga;
8. Alokasi dana Desa bagi masing- masing Desa yang cukup besar, dan alokasi dana kelurahan.

Threat / Ancaman :

1. Masa Pandemi Virus Corona 2019 Disease yang menyebabkan penurunan ekonomi dan pendapatan masyarakat dan perlambatan kegiatan pembangunan berkelanjutan
2. Sumber Daya aparatur Kecamatan dan Desa yang belum optimal;
3. Sifat masyarakat yang cenderung mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat;
4. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas;
5. Manajemen Pengelolaan keuangan dan asset khususnya Desa yang masih lemah.

Analisa keberhasilan kinerja Program dan kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi yang diemban dapat dijelaskan dalam Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Porsea berikut:

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah. Hal kritis yang dimaksud adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah dicapai banyak keberhasilan dan komitmen untuk memperbaiki kinerja maupun pelayanan publik antara lain agar setiap urusan masyarakat dapat diselesaikan tepat waktu dan efisien seperti pelayanan kependudukan, proses perizinan dan terfasilitasinya proses pembangunan, terbinanya kelompok masyarakat dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan kedudukan hak dan kewajibannya.

Selanjutnya dengan Pengelolaan Dana Desa bagi masing-masing Desa yang juga perlu difasilitasi, diawasi dan peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan Dana Desa untuk mempercepat proses pembangunan dan mengentaskan kemiskinan maupun pemerataan pembangunan.

Tentu dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban banyak permasalahan dan hambatan yang ditemui sehingga mempengaruhi capaian kinerja Kecamatan antara lain Sumber Daya Aparatur yang perlu ditingkatkan baik penguasaan Tupoksi, penguasaan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Masyarakat, pelayanan media informasi dan teknologi sejalan dengan perkembangan jaman, minimnya sarana dan prasarana Pemerintahan desa seperti fasilitas kantor yang sangat mendesak, tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan perlu ditingkatkan, rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana desa, berkurangnya animo masyarakat akan wawasan kebangsaan maupun berkurangnya tradisi budaya gotong royong dan rendahnya rasa peduli/memiliki di tingkat masyarakat.

Demikian juga masa Pandemi Virus Corona 2019 yang belum berakhir turut mempengaruhi rencana Program dan kegiatan yang dilaksanakan yang menyebabkan penurunan pendapatan dan ekonomi masyarakat.

Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program, tantangan ke depan dalam peningkatan kinerja Kantor Camat Porsea antara lain melambatnya target kinerja Pemerintah Kabupaten dengan tidak tercapainya indikator kinerja yang ditetapkan, relatif sulitnya untuk mendapatkan pekerjaan ditandai

dengan semakin meningkatnya tingkat pengangguran khususnya generasi muda dan derasnya kemajuan teknologi tidak dibarengi dengan penguasaan SDM akan penguasaan teknologi disegala bidang.

Sementara peluang yang didapat untuk meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain komitmen Pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan dan pembangunan, Kerjasama dengan stake holder dan komponen masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberhasilan pembangunan belum tergalinya sepenuhnya potensi-potensi Kecamatan seperti prospektif pembukaan lahan-lahan tidur, potensi pariwisata, perikanan danau dan pengembangan industri rumah tangga.

Di samping itu letak geografis Kecamatan Porsea yang strategis berada pada jalur perlintasan jalan Negara dan terdapatnya perusahaan- perusahaan besar membuka peluang meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat.

Berdasarkan penjabaran tersebut di atas, diharapkan untuk mempercepat proses pembangunan di Kecamatan Porsea disarankan agar perencanaan program kedepan dapat memprioritaskan penguatan lembaga Desa, peningkatan sarana dan prasaran Pemerintahan Desa seperti pengadaan Kantor Desa, penataan dan penguatan fungsi Kelurahan, dan peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat Pedesaan untuk pelaksanaan proses pembangunan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Porsea ditentukan isu-isu penting sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan segala potensi yang ada di wilayah kecamatan. Dengan adanya penyerahan kewenangan dan dengan tetap berdasarkan pada azas kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku Camat dapat mendayagunakan segenap potensi untuk mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan.
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan Porsea dalam penyelenggaraan pembangunan terlebih pada peningkatan pembangunan infrastruktur yang nantinya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur karena keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting

maka aparatur yang ada harus mencukupi termasuk di desa / kelurahan yang ada di Kecamatan Porsea harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan yang berkualitas.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.
6. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Penanggulangan kemiskinan dengan memfasilitasi penyediaan data, dan bantuan
8. Peningkatan keindahan dan kebersihan lingkungan / kota.
9. Mendukung Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik apalagi dengan adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
10. Alokasi dana kelurahan untuk pemberdayaan masyarakat Kelurahan.
11. Adanya keterbukaan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan.
12. Pemberdayaan masyarakat dalam proses pembangunan.
13. Peningkatan kerjasama diantara komponen kehidupan social masyarakat dengan menggali dan menghidupkan kembali **Martonggo Raja**
14. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dengan Dinas dan Instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan

2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD

Sebelum penyusunan finalisasi RENJA Kantor Camat Porsea , banyak proses yang dilaksanakan sehingga RENJA dimaksud benar-benar menjadi penetapan kinerja tahunan yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam penyusunannya terlebih dahulu ditetapkan Rancangan Awal yang selanjutnya mendapatkan proses perbaikan baik dalam hal penajaman, memperhatikan isu-isu yang mendesak atau menjadi skala prioritas maupun perkembangan yang terjadi.

Berdasarkan hal tersebut, maka RENJA Kecamatan Porsea Tahun 2022 ini telah melalui proses dengan masukan dan perbaikan dari stake Holder, Masyarakat dan hasil Musrenbang baik Musrenbang Kecamatan maupun Musrenbang /RKPD Kabupaten Toba dan direview oleh APIP.

Review terhadap rancangan awal RKPD disajikan dalam Tabel T.C.3.1 berikut:

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Sebagaimana kita ketahui bahwa proses pelaksanaan Pembangunan terlebih dahulu ditetapkan Data Pembangunan yang tentu menjadi skala prioritas dan realistis dilaksanakan dan benar-benar dibutuhkan masyarakat. Kecamatan Porsea dalam melaksanakan proses pembangunan sedang berlangsung Musrenbang Desa dan Kecamatan dimana ditampung seluruh proses aspirasi masyarakat, hasil reses DPRD maupun para pemangku kepentingan. Selanjutnya disusun dalam suatu blue print atau Data Pembangunan Kecamatan Porsea untuk dirumuskan dan dibahas dalam forum musyawarah. Hasil forum musyawarah dimaksud menjadi Dokumen Pembangunan Kecamatan Porsea yang diusulkan dan dibawa dalam Musrenbang Kabupaten untuk dapat ditampung menjadi Program dan kegiatan Pembangunan yang ditampung baik dari Dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi , APBN maupun dana bantuan dari masyarakat / stake holder.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022, dengan Tema Pembangunan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dengan 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan dengan arah kebijakan percepatan pemulihan ekonomi yang didorong pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi dan peningkatan nilai tambah yang didukung oleh reformasi iklim usaha
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan dengan arah kebijakan yang mengurangi ketimpangan antar wilayah
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dengan arah kebijakan mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui penurunan angka kelahiran total dan memperkuat penyelenggaraan tata Kelola kependudukan
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dengan arah kebijakan memperkuat gerakan nasional revolusi mental
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dengan infrastruktur pelayanan dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dengan arah kebijakan pengurangan dan penanggulangan beban pencemaran untuk meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup terutama penanganan limbah B3 medis pasca pandemic covid 19 serta peningkatan kualitas udara, air, laut dan lahan sebagai penyangga system kehidupan masyarakat
7. Memperkuat stabilitas Politik, Hukum, Keamanan, HAM dan transformasi pelayanan public dengan arah kebijakan untuk mewujudkan konsolidasi demokrasi

Kecamatan Porsea sebagai Perangkat daerah tidak mendukung secara langsung Prioritas Pembangunan Nasional maupun Provinsi khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun SDG's. namun dukungan dalam pencapaian arah kebijakan Nasional, Provinsi dan Kabupaten tahun 2022 adalah melakukan sinkronisasi, sinergitas, dan harmonisasi perencanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dituangkan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Porsea Kabupaten Toba.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Untuk mendukung Visi Misi kabupaten Toba yaitu Terwujudnya Kabupaten Toba Unggul dan Bersinar maka Kecamatan Porsea mempunyai tujuan dan sasaran Jangka Menengah Pelayanan sebagaimana terkait Misi Kedua Kabupaten Toba yaitu “Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) yang Unggul dan Andal “ maka dirumuskan tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Porsea yang akan dicapai sebagai berikut :

a. Tujuan

Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan Pemerintahan di Kecamatan

b. Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran Kecamatan Porsea adalah Meningkatnya Kinerja ASN yang Professional dalam Pelayanan Public di Kecamatan

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran dari RENSTRA Kecamatan Porsea, maka disusun Program Kerja Kecamatan Porsea dengan memperhatikan Visi Misi Kabupaten Toba Samosir yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten 2016-2021, memperhatikan aspek SPM, target/indikator kinerja dan program kegiatan yang menjadi skala prioritas. Program dan Kegiatan Kecamatan Porsea tahun 2022 terdiri dari 6 Program, 16 Kegiatan dan 36 Sub kegiatan dengan uraian sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA.
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

- Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Bahan Logistic Kantor
 - Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD
- d. Penggandaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan.
 - Pengadaan Meuble
 - Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Airdan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIC
- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertical
- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak di laksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan.
- Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah di Kecamatan
- c. Koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- Pelaksanan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang melibatkan Pihak Swasta
3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 - b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah dalam Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
 - Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
 - Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
 - c. Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republic Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertical di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
 - b. Koordinasi Penerapan Dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/sinergi dan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang -undangan dan/atau Kepolisian Negara Republic Indonesia
5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengalaman Pancasila, Pelaksanaan Undang- undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republic Indonesia
 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Local, Regional dan Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.
 - Koordinasi Pendamping Desa di Wilayahnya

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 Kecamatan Porsea adalah sebagaimana dalam Tabel TC.33 sebagai berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Porsea mempertimbangkan berbagai hal antara lain :

1. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Strategis yang dicapai Kecamatan Porsea Tahun 2021
2. Pencapaian Indikator Kinerja Kecamatan Porsea Tahun 2021.
3. Visi Misi Bupati Toba dalam mencapai Toba Unggul dan Bersinar 2026 yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Toba

Berdasarkan hal dan pertimbangan tersebut diatas, disusun Rencana Kerja dan Pendanaan pagu indikatif Perangkat Daerah Kecamatan Porsea Tahun 2022 dengan sumber dana dari Dana Alokasi Umum (DAU), DAU Kelurahan, DBH dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Tahun 2022.

Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2022 Kecamatan Porsea adalah sebagai mana Tabel berikut :

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Porsea Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari Renstra Kecamatan Porsea Periode 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan mengevaluasi/review Renstra Kecamatan Porsea tahun sebelumnya demi peningkatan pembangunan dan pelayanan publik.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penetapan Rencana Kerja ini, dengan tidak mengurangi makna dalam penyusunan RENJA ini, diharapkan saran-saran maupun kritik yang sifatnya membangun (konstruktif) guna perbaikan demi kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Porsea ini.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Porsea Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan dan program tidak bisa tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Porsea ini telah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Porsea, 2021

BUPATI TOBA,

Ir. POLTAK SITORUS

Penanggung Jawab	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten	
Camat	
Sekcam	
Kasi/ Kasubbag	
Staf	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Porsea Tahun 2022 ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan tahun kedua dari RENSTRA Kecamatan Porsea Periode 2021-2026, yang dalam pelaksanaannya juga memperhatikan dan mengevaluasi/review Renstra Kecamatan Porsea tahun sebelumnya demi peningkatan pembangunan dan pelayanan publik.

Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penetapan Rencana Kerja ini, dengan tidak mengurangi makna dalam penyusunan RENJA ini, diharapkan saran-saran maupun kritik yang sifatnya membangun (konstruktif) guna perbaikan demi kesempurnaan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Porsea ini.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Porsea Tahun 2022 ini disusun, dengan harapan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walaupun dalam pelaksanaan kegiatan dan program tidak bisa tercapai sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Porsea ini telah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Porsea, 2021

BUPATI TOBA,

Ir. POLTAK SITORUS

**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
PROPINSI/KABUPATEN KOTA
TAHUN 2022**

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PORSEA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan	
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16	
7:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatnya kinerja ASN yang profesional dalam pelayanan Publik di Kecamatan		Cakupan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	100%						3,801,262,759	3,901,645,623	
7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Porsea			Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	3 jenis	Dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD	3 jenis	34,723,290	34,723,290		
7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Porsea			Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat daerah	3 jenis	Dokumen Renstra, Renja, dan PK	3 jenis	6,340,290	6,340,290	2	
7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja OPD	4 jenis	Dokumen LK,Lap.Keuangan, LKPJ, Evaluasi Renstra/Renja	4 dokumen	28,383,000	28,383,000	2	
7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Porsea			Cakupan ketersediaan administrasi keuangan OPD	2 jenis	Cakupan ketersediaan administrasi keuangan OPD	2 jenis	2,695,817,469	2,796,200,333		
7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	67 orang	Gaji dan tunjangan ASN	1 tahun	2,695,817,469	2,796,200,333	2	
7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			Porsea			cakupan ketersediaan administrasi perkantoran	7 jenis	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran	7 jenis	460,522,000	460,522,000		
7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor			Porsea			Ketersediaan dan kelengkapan alat listrik	10 jenis	Tersedianya kelengkapan alat listrik	1 tahun	12,500,000	12,500,000	2	
7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor			Porsea			Ketersediaan ATK dan peralatan kebersihan Kantor Kecamatan dan kelurahan	24 jenis	ATK dan peralatan kebersihan kantor	4 Unit Kerja	89,122,000	89,122,000	2	
7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga			Porsea			Jumlah penyediaan peralatan dan alat rumah tangga kantor dan rumah dinas	10 jenis	Alat alat keperluan rumah tangga	10 jenis	17,500,000	17,500,000	2	
7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Porsea			Jumlah penyediaan konsumsi rapat rapat dan tamu	500 paket	konsumsi rapat koordinasi dan tamu	500 paket	135,000,000	135,000,000	2	
7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Porsea			Jumlah barang cetakan dan penggandaan	50000 lembar	Cetak bahan cetakan dan foto copy/ penggandaan	50000 lembar	22,000,000	22,000,000	2	
7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Porsea			Jumlah penyediaan bahan bacaan kantor	6 jenis	Jumlah penyediaan bahan bacaan kantor	6 jenis	4,400,000	4,400,000	2	
7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						Laporan Perjalanan dinas	1100 OH	Laporan Perjalanan dinas	1100 OH	180,000,000	180,000,000	2	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Porsea			Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang tersedia untuk menunjang kinerja Aparatur	17 jenis	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang tersedia untuk menunjang kinerja Aparatur	17 jenis	173,500,000	173,500,000	
7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan			Porsea			Jumlah pengadaan kendaraan dinas	2 unit	Kendaraan dinas roda dua	2 unit	55,000,000	55,000,000	
7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel			Porsea			Jumlah pengadaan peralatan kantor yang ditampung	14 jenis	Pengadaan peralatan kantor	14 jenis	83,500,000	83,500,000	2
7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya						Jumlah dukungan fasilitas sarana prasarana pendukung kantor yang tersedia	2 unit	Fasilitas sarana dan prasarana pendukung kantor	2 unit	35,000,000	35,000,000	2
7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Porsea			Jumlah dukungan jasa penunjang kegiatan Aparatur	6 jenis	Jumlah dukungan jasa penunjang kegiatan Aparatur	6 jenis	253,200,000	253,200,000	
7.01.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Porsea			Tagihan rekening listrik,air internet, pulsa yang ditampung	4 jenis	Pembayaran rek dan listrik,air,telepon internet	4 jenis	68,200,000	68,200,000	2
7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor						Jumlah tenaga kontrak dan jasa pengelola keuangan yang tersedia	18 orang	Jumlah tenaga kontrak dan jasa pengelola keuangan yang tersedia	18 orang	185,000,000	185,000,000	2
7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah			Porsea			Persentase Barang Milik Daerah/asset dalam kondisi baik	100 %	Terawatnya barang /asset daerah	100 %	183,500,000	183,500,000	
7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan			Porsea			Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	9 unit	Perawatan kendaraan dinas	9 unit	91,000,000	91,000,000	2
7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya			Porsea			Jumlah gedung kantor dan rumah dinas dalam kondisi baik	5 unit	Perawatan gedung dan rumah dinas	5 unit	65,000,000	65,000,000	2
7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya						Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dirawat	10 jenis	Perawatan peralatan mesin kantor	10 jenis	27,500,000	27,500,000	2
7:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik				Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	30 keg					198,553,571	198,553,571	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Porsea			Cakupan Kegiatan Pemerintah di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	30 Jenis	Koordinasi kegiatan fisik/non fisik di Kecamatan	30 Jenis	117,672,500	117,672,500	
7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Porsea			Dokumen Hasil Musrenbang	18 dokumen	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	18 kegiatan	46,500,000	46,500,000	2
				Porsea			Jumlah instansi/OPD yang dikoordinasikan terkait penyediaan data bidang perekonomian dan sosial	10 Instansi/OPD	Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	10 Instansi/OPD	6,000,000	6,000,000	2
				Porsea			Jumlah jenis ketersediaan data di bidang sosial	20 jenis	Penyediaan data sosial	20 jenis	2,500,000	2,500,000	2
				Porsea			Jumlah kegiatan kebudayaan dan kearifan lokal yang diselenggarakan	2 kegiatan	Karnaval dan atraksi budaya	2 kegiatan	42,322,500	42,322,500	2
				Porsea			Jumlah kegiatan Pemerintah di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan	5 Instansi/OPD	Koordinasi pelaksanaan tugas tugas di Kecamatan	5 Instansi/OPD	11,000,000	11,000,000	2
				Porsea			Jumlah rekomendasi dan koordinasi penanganan dan pengendalian bencana alam dan SDA	17 kasus	Koordinasi dan penanggulangan bencana di Kecamatan	17 kasus	3,850,000	3,850,000	2
							Koordinasi pencapaian target penerimaan PBB dan PAD	100 %	Koordinasi pencapaian target penerimaan PBB dan PAD	100 %	5,500,000	5,500,000	2
7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan			Porsea			Jumlah urusan Pemerintahan yang hak dan wewenangnya tanggungjawab Kecamatan	7 Urusan	Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan	7 Urusan	8,100,000	8,100,000	
7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Porsea			Jumlah pelayananan kemasyarakatan yang dilaksanakan	5 Urusan	Jumlah pelayananan kemasyarakatan yang dilaksanakan	5 Urusan	6,000,000	6,000,000	2
				Porsea			Jumlah permintaan rekomendasi ijin dan non perizinan yang masuk	30 buah	Penerbitan rekomendasi perizinan/ non perizinan	30 buah	1,500,000	1,500,000	2
							Jumlah laporan hasil monitoring/pengawasan harga sembako	4 kali	Laporan monitoring/pengawasan harga sembako	4 kali	600,000	600,000	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum			Porsea			Jumlah prasarana dan fasilitas umum yang berfungsi dengan baik	2 jenis	Berfungsinya sarana dan prasarana fasilitas publik	2 jenis	72,781,071	72,781,071	
7.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta						Jumlah fasilitas prasarana dan fasilitas umum yang terpelihara	2 jenis	Perawatan fasilitas pelayanan publik	2 jenis	72,781,071	72,781,071	
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan				Persentase Pembangunan di Kecamatan yang di Koordinasikan	100%					2,349,153,000	2,359,153,000	
7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			Porsea			Jumlah Kegiatan Pemerintah di bidang pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan dan difasilitasi	4 kegiatan	Jumlah Kegiatan Pemerintah di bidang pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan dan difasilitasi	4 kegiatan	196,653,000	196,653,000	
7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa			Porsea			Jumlah Musyawarah Pembangunan Desa yang terfasilitasi	28 Keg	terfasilitasinya Musyawarah pembangunan desa	28 kegiatan	15,000,000	15,000,000	2
				Porsea			Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa yang terfasilitasi	28 kali	Fasilitasi musrenbang Desa	28 kali	16,500,000	16,500,000	2
7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan			Porsea			Jumlah Pola Desa Percontohan	3 Desa	Pembinaan desa percontohan	3 Desa	65,000,000	65,000,000	2
				Porsea			Jumlah organisasi / kelompok kemasyarakatan yang dibina	7 Pokmas	Pembinaan kelompok masyarakat dan pemuda	7 Pokmas	88,153,000	88,153,000	2
							Jumlah kegiatan gotong royong yang di fasilitasi/digagasi Pemerintah Kecamatan	4 Keg	Fasiliatsi Pelaksanaan gotong royong	4 kegiatan	12,000,000	12,000,000	2
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			Porsea			Meningkatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dan pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan	33 Keg	Meningkatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dan pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan	33 kegiatan	2,107,500,000	2,117,500,000	
7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			Porsea			Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yang terfasilitasi	3 kelurahan	Fasiliatsi musyawarah Pembangunan Kelurahan	3 kelurahan	7,500,000	7,500,000	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			Porsea			Jumlah pendampingan dan fasilitasi kegiatan sarana dan prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	15 kegiatan	Monitoring dan penagwasan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	15 kegiatan	1,500,000,000	1,510,000,000	2
7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan						Jumlah pendampingan dan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	15 kegiatan	Jumlah pendampingan dan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	15 kegiatan	600,000,000	600,000,000	2
7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			Porsea			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina	5 Lembaga	Terbinanya Lembaga di kecamatan	5 Lembaga	45,000,000	45,000,000	
7.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan						Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	5 Keg	Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5 Kegiatan	45,000,000	45,000,000	2
7:01:04	Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum				berkurangnya kasus komplain/pengaduan masyarakat akan ketertiban umum	48 kasus					137,100,000	137,100,000	
7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			Porsea			Jumlah kordinasi kegiatan dan penanganan di bidang ketentraman dan ketertiban umum	48 Keg	Koordinasi dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum	48 kegiatan	95,000,000	95,000,000	
7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			Porsea			Jumlah kegiatan /koordinasi dan komunikasi dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal yang dilakukan	24 kali	Jumlah kegiatan /koordinasi dan komunikasi dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal yang dilakukan	24 kali	35,000,000	35,000,000	2
7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat						Jumlah kegiatan /koordinasi dan komunikasi dengan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama yang dilakukan	24 kali	Rapat Koordinasi Forkompincam dan Tokoh masyarakat	24 kali	60,000,000	60,000,000	2
7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			Porsea			Pengurangan kasus komplain/pengaduan masyarakat akan ketertiban umum	200 kasus / pengaduan	Kurangnya kasus komplain/pengaduan masyarakat	200 kasus / pengaduan	42,100,000	42,100,000	
7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan			Porsea			Jumlah pendampingan dan koordinasi kegiatan yang dilaksanakan	150 kali	Koordinasi dan pendampingan Kecamatan akan kegiatan di Kecamatan	150 kali	35,000,000	35,000,000	2

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia			Porsea			Jumlah kegiatan Pemilu dan Pilkadaes yang terfasilitasi	2 Keg	Jumlah kegiatan Pemilu dan Pilkadaes yang terfasilitasi	2 Kejiata	2,000,000	2,000,000	2
							Jumlah masalah pengaduan/kasus yang ditangani/diselesaikan	51 Kasus	Jumlah masalah pengaduan/kasus yang ditangani/diselesaikan	51 Kasus	5,100,000	5,100,000	2
7.01.05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum				cakupan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	20 kegiatan					233,345,145	233,345,145	
7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			Porsea			Jumlah kegiatan pemantapan wawasan Kebangsaan dan kehidupan beragama	20 Keg	Jumlah kegiatan pemantapan wawasan Kebangsaan dan kehidupan beragama	20 kejiatar	233,345,145	233,345,145	
7.01.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Porsea			Jumlah kegiatan HUT RI, HUT Toba dan Upacara / Kegiatan Kenegaraan lainnya yang dilaksanakan	14 Keg	Jumlah kegiatan HUT RI, HUT Toba dan Upacara / Kegiatan Kenegaraan lainnya yang dilaksanakan	14 kejiatar	126,455,901	126,455,901	2
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Porsea			Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ataupun difasilitasi	5 Keg	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ataupun difasilitasi	5 Kejiata	86,429,244	86,429,244	2
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						Koordinasi Antar Unsur Pimpinan Kecamatan	4 Orang	Koordinasi Antar Unsur Pimpinan Kecamatan	4 Orang	20,460,000	20,460,000	2
7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				Cakupan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan	17 Desa/Ke					137,613,570	137,613,570	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa			Porsea			Jumlah Kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan yang terkoordinasi dan terfasilitasi.	17 Keg	Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Desa dan Kelurahan	17 Kegiatan	137,613,570	137,613,570	
7.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa			Porsea			Jumlah Perdes/Perkades yang terfasilitasi	5 buah	Fasilitasi Perdes/Perkades	5 buah	15,000,000	15,000,000	2
7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Porsea			Jumlah desa/Kelurahan yang melakukan tertib administrasi	14 Desa	Meningkatnya tertib administrasi di Desa/Kelurahan	14 Desa	4,500,000	4,500,000	2
				Porsea			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	150 Orang	Pembinaan Aparatur Desa/Kelurahan	150 Orang	7,500,000	7,500,000	2
				Porsea			Jlh Data Monografi dan Profil Desa yang disusun	18 buah	Penyusunan Data Monografi dan profil Desa	18 buah	26,000,000	26,000,000	2
				Porsea			Jumlah Desa/kelurahan yang dinilai/evaluasi	17 Desa/Kel	Evaluasi dan penilaian Lomba Desa/Kelurahan	17 Desa/Kel	15,000,000	15,000,000	2
				Porsea			Jumlah tapal batas Desa/Kel yang terselesaikan	14 Desa	Penyelesaian masalah tapal batas desa	14 Desa	5,000,000	5,000,000	2
				Porsea			Jumlah masalah asset / kekayaan Desa yang terselesaikan	34 kasus	Penyelesaian masalah asset/kekayaan desa	34 kasus	2,500,000	2,500,000	2
				Porsea			Jumlah pengisian dan PAW anggota BPD yang terfasilitasi	14 Desa	Pengisian dan PAW Anggota BPD	14 Desa	4,200,000	4,200,000	2
7.01.06.2.01.17	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya			Porsea			Jumlah Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang difasilitasi dan dimonitoring	200 Keg	Fasilitasi dana desa dan alokasi dana desa	2 kegiatan	38,500,000	38,500,000	2
							Jumlah kegiatan pembangunan dan pemerintahan desa yang dikoordinasikan dan pendampingan	2 Keg	Koordinasi kegiatan pembangunan di Desa	200 Kegiatan	19,413,570	19,413,570	2
Jumlah Rp.											6,857,028,045	6,967,410,909	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif Tahun 2022	Perkiraan maju Tahun 2023	Jenis Kegiatan
					Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan				
					Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target	Tolak Ukur	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16

Tabel T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA KANTOR CAMAT PORSEA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA KANTOR CAMAT PORSEA S/D TAHUN 2021
KABUPATEN TOBA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021 (akhir periode)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2020						Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2021)		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan			
			K	Rp	K	Rp	Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020		Tingkat Realisasi (%)		9=(5+7)		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)		9=(5+7)		10=(5+7+9)		11=(10/4)	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
4.1.12.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	100	1,498,703,192	100	944,321,660	100	263,552,845	100	247,455,653	100%	94%	100%	274,513,085	100	1,466,290,398	100%	97.84%
4.1.12.1.2	Penyediaan alat tulis kantor	Penyediaan ATK kecamatan	192	178,600,000	94	95,316,400	32	29,997,860	34	31,758,500	106%	106%	32	29,998,910	128	157,073,810	67%	87.95%
4.1.12.1.3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Barang cetakan dan penggandaan	24	49,820,000	16	37,707,000	4	9,999,885	4	12,597,400	100%	126%	4	10,499,925	20	60,804,325	83%	TC
4.1.12.1.5	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	80	21,340,000	55	32,167,100	0	0	0	0	0%	0%	20	7,381,000	55	39,548,100	69%	185.32%
4.1.12.1.6	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Alat alat rumah tangga	20	7,400,000	15	3,772,700	0	0	0	0	0%	0%	0	-	15	3,772,700	75%	50.98%
4.1.12.1.9	Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman rapat dan tamu	1800	77,500,000	980	55,580,000	300	15,000,000	225	5,210,000	75%	35%	300	16,500,000	1,205	77,290,000	67%	99.73%
4.1.12.1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Perjalanan dinas luar daerah	120	86,500,000	34	34,202,100	20	14,964,000	3	2,430,000	15%	16%	20	11,486,000	37	48,118,100	31%	55.63%
4.1.12.1.11	Penyediaan jasa pendukung teknis/administratif perkantoran	Pembayaran honorarium pegawai honorer kecamatan	48	357,800,000	24	204,834,100	8	65,000,000	6	56,250,000	75%	87%	8	65,000,000	30	326,084,100	63%	91.14%
4.1.12.1.12	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran rekening internet, listrik, air dan surat kabar	24	133,243,192	16	92,364,460	4	23,793,100	4	27,356,003	100%	115%	4	24,024,200	20	143,744,663	83%	107.88%
4.1.12.1.13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Perjalanan dinas dalam daerah Kab. Toba Samosir	1200	339,000,000	965	256,535,000	200	60,000,000	198	61,890,000	99%	103%	200	65,000,000	1,163	383,425,000	97%	113.10%
4.1.12.1.14	Penyediaan penunjang teknis/administratif perkantoran	Pembayaran honorarium pengelola keuangan	42	219,000,000	20	120,780,800	7	37,250,000	7	45,070,000	100%	121%	7	37,493,550	27	203,344,350	64%	92.85%
4.1.12.1.18	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	Pengurusan surat surat kendaraan dinas roda 2 dan 4	36	20,500,000	24	6,643,500	6	3,129,500	7	1,233,750	117%	39%	6	3,129,500	31	11,006,750	86%	53.69%

4.1.12.1.19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pembayaran biaya langganan surat kabar	12	8,000,000	6	4,418,500	3	4,418,500	4	3,660,000	0%	0%	3	4,000,000	10	12,078,500	83%	150.98%
4.1.12.2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rasio Luas kantor / jlh aparatur	100	1,000,700,000		528,549,283	100	166,990,011	100	63,416,196		38%	100	169,675,370	100	761,640,849	100%	76.11%
4.1.12.2.2	Pengadaan meubleur	Pengadaan mobiler	450	37,500,000	224	14,999,200	150	14,999,200	0	0	0%	0%	150	12,500,000	224	27,499,200	50%	73.33%
4.1.12.2.8	Pemeliharaan rutin/ berkala rumah dinas	Pemeliharaan dan perawatan rumah dinas camat	1	123,000,000	1	81,277,000	1	24,999,901	1	6,740,000	100%	27%	1	24,999,316	1	113,016,316	100%	91.88%
4.1.12.2.9	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	Pemeliharaan/ perawatan gedung kantor camat dan Kelurahan	4	250,000,000	4	92,299,100	4	54,994,030	4	21,683,000	100%	39%	4	49,999,974	4	163,982,074	100%	65.59%
4.1.12.2.11	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	Pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	6	342,700,000	6	163,788,983	6	59,498,880	3	29,681,196	50%	50%	6	59,498,880	6	252,969,059	100%	73.82%
4.1.12.2.13	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor	Pemeliharaan komputer, printer dan mesin babat	60	61,500,000	29	40,021,000	10	12,498,000	10	5,312,000	100%	43%	10	9,290,000	39	54,623,000	65%	88.82%
4.1.12.2.25	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Kendaraan dinas roda 2 (dua)	2	40,000,000	1	22,443,000	0	0	0	0	0%	0%	0	-	1	22,443,000	50%	56.11%
4.1.12.2.27	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Perlengkapan gedung kantor	7	119,000,000	5	40,021,000	0	0	0	0	0%	0%	1	13,387,200	5	53,408,200	71%	44.88%
4.1.12.2.29	Pengadaan peralatan gedung kantor	Peralatan gedung kantor	5	27,000,000	1	73,700,000	0	0	0	0	0%	0%	0	-	1	73,700,000	20%	272.96%
4.1.12.3	Program Peningkatan disiplin aparatur	1. Persentase tingkat kehadiran pegawai	100	136,800,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0%	0%	0	-	0	10,000,000	0%	7.31%
4.1.12.3.1	Pengadaan mesin/ kartu absensi	Pengadaan mesin dan kartu absensi	1	10,000,000	1	10,000,000	0	0	0	0	0%	0%	0	-	1	10,000,000	100%	100.00%
4.1.12.3.2	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	80	55,800,000	0	-	0	0	0	0	0%	0%	0	-	0	0	0%	0.00%
4.1.12.3.4	Pengadaan pakaian korpri	Pengadaan pakaian Korpri	40	12,500,000	0	-	20	0	0	0	0%	0%	0	-	0	0	0%	0.00%
4.1.12.3.5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya pakaian khusus dan hari-hari tertentu	120	58,500,000	0	-	0	0	0	0	0%	0%	0	-	0	0	0%	0.00%
4.1.12.5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	100	85,900,000	100	26,896,100	100	15,598,450	100	4,332,000	100%	28%	100%	15,797,250	200	47,025,350	100%	54.74%

4.1.12.5.2	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Penyusunan Renstra, LK,PK,LPPD, honorarium operator e- planning	28	85,900,000	10	26,896,100	5	15,598,450	5	4,332,000	100%	28%	5%	15,797,250	15	47,025,350	54%	54.74%
4.1.12.6	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina kecamatan	122	275,000,000	17	150,808,300	95	47,499,625	17	8,250,200	17%	17%	98%	44,999,940	34	204,058,440	28%	74.20%
4.1.12.6.1	Pembinaan organisasi perempuan	Pelatihan TPK3PKK,LP3PKK, Rakor dan Operasional TP.PKK Kec	102	275,000,000	72	150,808,300	17	47,499,625	17	8,250,200	100%	17%	17	44,999,940	89	204,058,440	87%	74.20%
4.1.12.7	Program Pengembangan Nilai Budaya	Pemberian dukungan dan kerjasama di bidang budaya	158	120,000,000	3	84,999,000	14	29,998,440	0	0	0%		14	29,998,160	3	114,997,160	2%	95.83%
4.1.12.7.1	Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	Pelaksanaan Karnaval Danau Toba	4	120,000,000	3	84,999,000	1	29,998,440	0	0	0%	0%	1	29,998,160	3	114,997,160	75%	95.83%
4.1.12.8	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Meningkatnya kegiatan kepemudaan kreatif dan inovatif	388	98,000,000	0	-	68	19,981,290	0	0	0%	0%	69	14,999,885	0	14,999,885	0%	15.31%
4.1.12.8.1	Pembinaan organisasi kepemudaan	Kegiatan organisasi kepemudaan	102	98,000,000	0	-	17	19,981,290	0	0	0%	0%	17	14,999,885	0	14,999,885	0%	15.31%
4.1.12.9	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan olah raga di daerah, kompetisi olah raga di daerah, kompetisi olah raga tingkat pelajar dan perkembangan lptek terhadap olahraga	154	71,000,000	2	11,500,000	30	14,993,100	0	0	0,16%	0%	28	14,996,850	0,16	26,496,850	0,16%	37.32%
4.1.12.9.1	Pembinaan Olahraga yang berkembang di masyarakat	Seleksi dan latihan peserta/kontingen olahraga	6	71,000,000	1	11,500,000	1	14,993,100	0	0	0%	0%	1	14,996,850	1	26,496,850	17%	37.32%
4.1.12.10	Program pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah kegiatan / perayaan HUT RI, HUT Tobasa, Oikumene yang diselenggarakan	255	965,320,000	12	552,123,600	50	187,498,530	3	36,219,000	6%	19%	50	189,497,660	15	777,840,260	6%	80.58%
4.1.12.10.1	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	Pelaksanaan perayaan natal oikumene Kecamatan dan fasilitasi MTQ Tingkat kecamatan	12	232,920,000	6	181,567,600	2	37,498,920	2	10,144,000	100%	27%	2	37,498,920	8	229,210,520	67%	98.41%

4.1.12.10.2	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	Pelaksanaan HUT Kab. Toba, HUT RI dan Koordinasi Forkompincam	12	732,400,000	8	370,556,000	3	149,999,610	3	26,075,000	100%	17%	3	151,998,740	11	548,629,740	92%	74.91%
4.1.12.11	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Cakupan desa berkembang	85	338,500,000	15	193,927,940	88	67,174,355	20	18,735,600	4%	28%	90	67,497,040	35	280,160,580	41%	82.77%
4.1.12.11.1	Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Fasilitasi Desa Percontohan dan pelaksanaan gotong royong Kelurahan/ Kecamatan	36	241,000,000	15	121,243,800	6	49,683,925	4	9,295,000	67%	19%	6	49,997,635	19	180,536,435	53%	74.91%
4.1.12.11.2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Desa	Koordinasi dan konsolidasi pemberhasilan pelaksanaan RPJM desa dan RKP Desa dan evaluasi APBDes	84	97,500,000	26	72,684,140	14	17,490,430	14	9,440,600	0%	0%	14	17,499,405	40	99,624,145	48%	102.18%
4.1.12.12	Program Pengembangan Data/Informasi	Buku Profil/Monografi Kecamatan	346	39,000,000	0	-	0	0	0	0		0%	0	-		0		0.00%
4.1.12.12.1	Penyusunan Profil Daerah	Pembuatan buku/profil/monografi kecamatan	30	39,000,000	0	-	0	0	0	0	0%	0%	0	-	0	0	0%	0.00%
4.1.12.13	Program perencanaan pembangunan daerah	Terlaksananya dan tertatanya perencanaan pembangunan daerah dengan baik	100	345,424,000	100	130,364,400	100	64,702,100	100	38,989,300	100%	60%	100%	64,749,930	100	234,103,630	100%	67.77%
4.1.12.13.1	Penyelenggaraan musrenbang RKPD	Pelaksanaan Musrenbang RKPD Desa/Kelurahan dan Kecamatan	108	311,900,000	72	88,891,600	18	58,976,960	18	28,160,800	100%	48%	18	58,999,955	90	176,052,355	83%	56.45%
4.1.12.13.2	Penyusunan Renja	Terlaksananya musyawarah perencanaan desa dan musyawarah RKPD di Kecamatan	4	10,924,000	1	18,924,000	0	0	0	0	0%	0%	3	5,749,975	1	24,673,975	25%	225.87%
4.1.12.13.3	Koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Renstra, renja dan honorarium e-planning	9	22,600,000	4	22,548,800	3	5,725,140	3	10,828,500	100%	189%	0	-	7	33,377,300	78%	147.69%
4.1.12.14	Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Persentase terkendalinya pengamanan lalu lintas	100	133,000,000	100	119,978,900	100	19,249,400	100	9,388,000	100%	49%	100	19,249,400	100	148,616,300	100%	111.74%

4.1.12.14.1	Pengadaan/pemeliharaan lampu penerangan jalan kecamatan	Penyediaan peralatan dan kelengkapan perawatan lampu jalan kecamatan	120	133,000,000	80	119,978,900	20	19,249,400	15	9,388,000	75%	49%	20	19,249,400	95	148,616,300	79%	111.74%
4.1.12.15	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kecamatan yang dibangun / dipelihara	133	85,000,000	4	107,305,000	27	9,967,100	4	0	15%	0%	47	9,999,550	8	117,304,550	6%	138.01%
4.1.12.15.1	Penataan RTH	Perawatan dan pembuatan taman kecamatan	30	85,000,000	14	107,305,000	6	9,967,100	0	0	0%	0%	6	9,999,550	14	117,304,550	47%	138.01%
4.1.12.16	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Jumlah ruas jalan kecamatan dan desa dalam kondisi bersih dari semak belukar	155	41,000,000	15	41,000,000	0	0	0	0%	0%	0	-	15	41,000,000	10%	100.00%	
4.1.12.16.1	Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan/pembabatan bahu jalan	Terlaksananya pemeliharaan bahu jalan	15	41,000,000	15	41,000,000	0	0	0	0%	0%	0	-	15	41,000,000	100%	100.00%	
4.1.12.21	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah ruas jalan di Kecamatan dan Desa dalam kondisi bersih dari semak belukar	8	9,000,000,000	4	990,486,687	3	2,109,415,192	0	1,394,614,704	67%	100%	3	2,999,999,910	7	5,385,101,301	88%	59.83%
4.1.12.21.1	Pembangunan Sarana Prasarana dan Infrastruktur Kelurahan	Sarana dan prasarana kebersihan, transportasi, keselamatan dan kesehatan lingkungan pemukiman kelurahan	12	7,350,000,000	6	916,173,317	4	1,110,388,235	8	1,005,802,309	100%	91%	3	2,400,000,000	14	4,321,975,626	117%	58.80%
4.1.12.21.2	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pelatihan, pelaksanaan kegiatan dan penyediaan kelengkapan terkait usaha pemberdayaan masyarakat kelurahan	9	1,650,000,000	3	74,313,370	3	999,026,957	3	388,812,395	100%	39%	4	599,999,910	6	1,063,125,675	67%	64.43%
	Jumlah Rp.			14,233,347,192		3,892,260,870		3,016,620,438		1,821,400,653			3,915,974,030		9,629,635,553		67.66%	

TABEL T-C.30.
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KANTOR CAMAT PORSEA
KABUPATEN TOBA

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023		
1	2	3	4	9	10			15	12	16		17	
1	Cakupan layanan administrasi yang tertangani	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Rasio luas kantor / jumlah aparatur	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Persentase tingkat kehadiran pegawai	-	-	100%	100%	100%	100%	38%	100%	100%	100%	100%	
4	Tingkat ketepatan menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
5	Jumlah Organisasi perempuan yang dibina Kecamatan	-	-	122 Desa	122 desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	17 Desa	
6	Pemberian dukungan dan kerjasama di bidang budaya	-	-	13 lembaga	13 lembaga	2 kegiatan	3 kegiatan	0%	0%	2 kegiatan	3 kegiatan		
7	Meningkatnya Kegiatan Kepemudaan yang kreatif dan inovatif	-	-	69 Organisasi	69 Organisasi	17 organisasi	17 organisasi	0 Organisasi	0 Organisasi	17 organisasi	17 organisasi		

8	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan olahraga di daerah, kompetisi olah raga tingkat pelajar dan perkembangan Iptek terhadap olahraga	-	-	30 kali	28 kali	0 kali						
9	Jumlah kegiatan / perayaan HUT RI, HUT Tobasa, Oikumene yang diselenggarakan	-	-	47 kali	50 kali	20 keg	20 keg	3 kali	3 kali	20 keg	20 keg	
10	1. Cakupan desa berkembang	-	-	88%	90%	3 desa	3 desa	4 desa	4 desa	3 desa	3 desa	
11	Buku Profil/Monografi Kecamatan	-	-	63 buku	57 buku	0 buku						
12	Terlaksananya dan tertatanya perencanaan pembangunan daerah dengan baik	-	-	100%	100%	28 kali	28 kali	100%	100%	28 kali	28 kali	
13	Persentasi terkendalinya pengamanan lalu lintas	-	-	100%	100%	1 jenis	1 jenis	100%	100%	1 jenis	1 jenis	
14	Jumlah Ruang Terbuka Hijau (RTH) Taman Kecamatan yang dibangun/dipelihara	-	-	27 taman	47 taman	1 jenis	1 jenis	0 taman	2 taman	1 jenis	1 jenis	
15	Jumlah ruas jalan kecamatan dan desa dalam kondisi bersih dari semak belukar	-	-	2 ruas	3 ruas	15 keg	15 keg	0 ruas	14 ruas	15 keg	15 keg	

Tabel TC.33
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022
DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2023
KABUPATEN TOBA

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PORSEA

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Tahun 2023			
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif
1	2	3	4	5	6		7	8	9	6		11
1	7:01:01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Cakupan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan		100	%	3,801,262,759.00			100	%	3,901,645,623.00
	7.01.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja OPD		3	jenis	34,723,290.00			3	jenis	34,723,290.00
	7.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat daerah	Porsea	3	jenis	6,340,290.00	DAU		3	jenis	6,340,290.00
	7.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja OPD	Porsea	4	jenis	28,383,000.00	DAU		4	jenis	28,383,000.00
	7.01.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan ketersediaan administrasi keuangan OPD		2	jenis	2,695,817,469.00			2	jenis	2,796,200,333.00
	7.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Porsea	35	orang	2,695,817,469.00	DAU		67	orang	2,796,200,333.00
	7.01.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	cakupan ketersediaan administrasi perkantoran		7	jenis	460,522,000.00			7	jenis	460,522,000.00
	7.01.01.2.06.01	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Ketersediaan dan kelengkapan alat listrik	Porsea	10	jenis	12,500,000.00	DAU		10	jenis	12,500,000.00
	7.01.01.2.06.02	Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Ketersediaan ATK dan peralatan kebersihan Kantor Kecamatan dan kelurahan	Porsea	24	jenis	89,122,000.00	DAU		24	jenis	89,122,000.00
	7.01.01.2.06.03	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan dan alat rumah tangga kantor dan rumah dinas	Porsea	10	jenis	17,500,000.00	DAU		10	jenis	17,500,000.00
	7.01.01.2.06.04	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan konsumsi rapat rapat dan tamu	Porsea	500	paket	135,000,000.00	DAU		500	paket	135,000,000.00
	7.01.01.2.06.05	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	Porsea	50000	lembar	22,000,000.00	DAU		50000	lembar	22,000,000.00
	7.01.01.2.06.06	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan kantor	Porsea	6	jenis	4,400,000.00	DAU		6	jenis	4,400,000.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif
	7.01.01.2.06.09	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan Perjalanan dinas	Porsea	1100	OH	180,000,000.00	DAU		1200	OH	180,000,000.00
	7.01.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pengadaan barang milik Daerah yang tersedia untuk menunjang kinerja Aparatur		17	jenis	173,500,000.00			17	jenis	173,500,000.00
	7.01.01.2.07.02	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	Porsea	2	unit	55,000,000.00			2	unit	55,000,000.00
	7.01.01.2.07.05	Sub Kegiatan Pengadaan Meubel	Jumlah pengadaan peralatan kantor yang ditampung	Porsea	14	jenis	83,500,000.00	DAU		14	jenis	83,500,000.00
	7.01.01.2.07.11	Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah dukungan fasilitas sarana prasarana pendukung kantor yang tersedia	Porsea	2	unit	35,000,000.00			0	unit	35,000,000.00
	7.01.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah dukungan jasa penunjang kegiatan Aparatur		6	jenis	253,200,000.00			6	jenis	253,200,000.00
	7.01.01.2.08.02	Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tagihan rekening listrik,air internet, pulsa yang ditampung	Porsea	4	jenis	68,200,000.00	DAU		4	jenis	68,200,000.00
	7.01.01.2.08.04	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah tenaga kontrak dan jasa pengelola keuangan yang tersedia	Porsea	18	orang	185,000,000.00	DAU		18	orang	185,000,000.00
	7.01.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah/asset dalam kondisi baik		100	%	183,500,000.00			100	%	183,500,000.00
	7.01.01.2.09.01	Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan dinas dalam kondisi baik	Porsea	9	unit	91,000,000.00	DAU		11	unit	91,000,000.00
	7.01.01.2.09.09	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan rumah dinas dalam kondisi baik	Porsea	5	unit	65,000,000.00	DAU		5	unit	65,000,000.00
	7.01.01.2.09.10	Sub Kegiatan Pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dirawat	Porsea	10	jenis	27,500,000.00	DAU		10	jenis	27,500,000.00
2	7:01:02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		30	kegiatan	198,553,571.00			30	kegiatan	198,553,571.00
	7.01.02.2.01	Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Cakupan Kegiatan Pemerintah di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan		30	Jenis	117,672,500.00			30	Jenis	117,672,500.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Tahun 2023			
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	
	7.01.02.2.01.01	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah kegiatan Perencanaan Pembangunan dan Kegiatan Kecamatan yang dikoordinasikan dan dilaksanakan	Porsea	18	kegiatan	117,672,500.00	DAU		18	kegiatan	117,672,500.00
			Dokumen Hasil Musrenbang Kecamatan	Porsea	1	dokumen		DAU		1	dokumen	
			Jumlah kegiatan kebudayaan dan kearifan lokal yang diselenggarakan	Porsea	2	kegiatan		DAU		3	kegiatan	
			Jumlah Kegiatan Pemerintah di wilayah kecamatan yang dikoordinasikan	Porsea	5	Instansi/OPD		DAU		5	Instansi/C	
			Jumlah rekomendasi dan koordinasi penanganan dan pengendalian bencana alam dan SDA	Porsea	17	Kasus		DAU		17	Kasus	
			Koordinasi pencapaian target penerimaan PBB dan PAD	Porsea	100	%		DAU		100	%	
			Jumlah jenis ketersediaan data di bidang sosial	Porsea	20	jenis		DAU		20	jenis	
			Jumlah instansi/OPD yang dikoordinasikan terkait penyediaan data bidang perekonomian dan sosial	Porsea	10	Instansi / OPD		DAU		10	Instansi / OPD	
	7.01.02.2.02	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah urusan Pemerintahan yang hak dan wewenangnya tanggungjawab Kecamatan		7	Urusan	8,100,000.00			7	Urusan	8,100,000.00
	7.01.02.2.02.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah pelayananan kemasyarakatan yang dilaksanakan	Porsea	5	Urusan	8,100,000.00	DAU		5	Urusan	8,100,000.00
			Jumlah permintaan rekomendasi ijin dan non perizinan yang masuk	Porsea	30	buah		DAU		30	buah	
			Jumlah laporan hasil monitoring/pengawasan harga sembako	Porsea	4	kali		DAU		4	kali	
	7.01.02.2.03	Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Jumlah prasarana dan fasilitas umum yang berfungsi dengan baik		2	jenis	72,781,071.00			2	jenis	72,781,071.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Tahun 2023			
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif
	7.01.02.2.03.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta	Jumlah fasilitas prasarana dan fasilitas umum yang terpelihara	Porsea	2	jenis	72,781,071.00			2	jenis	72,781,071.00
3	7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Pembangunan di Kecamatan yang di Koordinasikan		100	%	2,349,153,000.00			100	%	2,359,153,000.00
	7.01.03.2.01	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Kegiatan Pemerintah di bidang pemberdayaan Desa yang dikoordinasikan dan difasilitasi		4	kegiatan	196,653,000.00			4	kegiatan	196,653,000.00
	7.01.03.2.01.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa	Jumlah Musyawarah desa yang terfasilitasi	Porsea	28	kegiatan	31,500,000.00	DAU		28	kegiatan	31,500,000.00
			Jumlah Pelaksanaan Musrenbang Desa yang terfasilitasi	Porsea	28	kali		DAU		28	kali	
	7.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Peningkatan Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah Pola Desa Percontohan	Porsea	3	Desa	165,153,000.00	DAU		3	Desa	165,153,000.00
			Jumlah organisasi / kelompok kemasyarakatan yang dibina	Porsea	7	Pokmas		DAU		7	Pokmas	
			Jumlah kegiatan gotong royong yang di fasilitasi/digagasi Pemerintah Kecamatan	Porsea	4	kegiatan		DAU		4	kegiatan	
	7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Meningkatnya pembangunan fasilitas sarana dan prasarana dan pemberdayaan kelompok masyarakat kelurahan		33	kegiatan	2,107,500,000.00			33	kegiatan	2,117,500,000.00
	7.01.03.2.02.01	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan yang terfasilitasi	Porsea	3	kali	7,500,000.00	DAU		3	kali	7,500,000.00
	7.01.03.2.02.02	Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah pendampingan dan fasilitasi kegiatan saran dan prasarana Kelurahan yang dilaksanakan	Porsea	15	kali	1,500,000,000.00	DAU		15	kali	1,510,000,000.00
	7.01.03.2.02.03	Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pendampingan dan fasilitasi kegiatan Pemberdayaan masyarakat Kelurahan yang dilaksanakan	Porsea	15	kali	600,000,000.00	DAU		15	kali	600,000,000.00
	7.01.03.2.03	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang dibina		5	Lembaga	45,000,000.00			5	Lembaga	45,000,000.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Tahun 2023			
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif
	7.01.03.2.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Kegiatan Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang dilaksanakan	Porsea	5	Kegiatan	45,000,000.00	DAU		5	Kegiatan	45,000,000.00
4	7:01:04	Program Ketenteraman dan Ketertiban Umum	berkurangnya kasus komplain/pengaduan masyarakat akan ketertiban umum		48	kasus	137,100,000.00			48	kasus	137,100,000.00
	7.01.04.2.01	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah kordinasi kegiatan dan penanganan di bidang ketentraman dan ketertiban umum		48	kegiatan	95,000,000.00			48	kegiatan	95,000,000.00
	7.01.04.2.01.01	Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan /koordinasi dan komunikasi dengan Kepolisian, TNI dan Instansi Vertikal yang dilakukan	Porsea	24	kali	35,000,000.00	DAU		24	kali	35,000,000.00
	7.01.04.2.01.02	Sub Kegiatan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan tokoh Masyarakat	Jumlah kegiatan /koordinasi dan komunikasi dengan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama yang dilakukan	Porsea	24	kali	60,000,000.00	DAU		24	kali	60,000,000.00
	7.01.04.2.02	Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengurangan kasus komplain/pengaduan masyarakat akan ketertiban umum		200	kasus / pengaduan	42,100,000.00			175	kasus / pengaduan	42,100,000.00
	7.01.04.2.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah pendampingan dan koordinasi kegiatan yang dilaksanakan	Porsea	150	kali	42,100,000.00	DAU		150	kali	42,100,000.00
			Jumlah kegiatan Pemilu dan Pilkades yang terfasilitasi	Porsea	2	Kegiatan		DAU		2	Kegiatan	
		Jumlah masalah pengaduan/kasus yang ditangani/diselesaikan	Porsea	51	Kasus	DAU			51	Kasus		
5	7:01:05	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	cakupan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		20	Kegiatan	233,345,145.00			20	Kegiatan	233,345,145.00
	7.01.05.2.01	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemantapan wawasan Kebangsaan dan kehidupan beragama		20	kegiatan	233,345,145.00			20	kegiatan	233,345,145.00

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022					Perkiraan Maju Tahun 2023		
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif
	7.01.05.2.01.01	Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah kegiatan HUT RI, HUT Toba dan Upacara / Kegiatan Kenegaraan lainnya yang dilaksanakan	Porsea	14	kegiatan				126,455,901.00	DAU	
	7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah kegiatan keagamaan yang dilaksanakan ataupun difasilitasi	Porsea	5	Kegiatan	86,429,244.00	DAU		5	Kegiatan	86,429,244.00
	7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Koordinasi Antar Unsur Pimpinan Kecamatan	Porsea	4	Orang	20,460,000.00	DAU		4	Orang	20,460,000.00
6	7.01.06	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan		17	Desa/K	137,613,570.00			17	Desa/Kel	137,613,570.00
	7.01.06.2.01	Kegiatan Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Jumlah Kegiatan Pemerintah Desa/Kelurahan yang terkoordinasi dan terfasilitasi.		17	Kegiatan	137,613,570.00			17	Kegiatan	137,613,570.00
	7.01.06.2.01.01	Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan kepala Desa	Jumlah Perdes/Perkades yang terfasilitasi	Porsea	5	buah	15,000,000.00	DAU		5	buah	15,000,000.00
	7.01.06.2.01.02	Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa/Kelurahan yang melakukan tertib administrasi	Porsea	14	Desa	64,700,000.00	DAU		14	Desa	64,700,000.00
		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang dibina	Porsea	150	Orang	DAU			150	Orang		
		Jlh Data Monografi dan Profil Desa yang disusun	Porsea	18	buah	DAU			18	buah		
		Jumlah Desa/kelurahan yang dinilai/evaluasi	Porsea	17	Desa/K	DAU			17	Desa/Kel		
		Jumlah tapal batas Desa/Kel yang terselesaikan	Porsea	14	Desa	DAU			14	Desa		
		Jumlah masalah asset / kekayaan Desa yang terselesaikan	Porsea	34	kasus	DAU			34	kasus		
		Jumlah pengisian dan PAW anggota BPD yang terfasilitasi	Porsea	14	Desa	DAU			14	Desa		

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2022				Perkiraan Maju Tahun 2023			
					Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif	Sumber dana	Catatan penting	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan dana/pagu indikatif
	7.01.06.2.01.17	Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan desa di wilayahnya	Jumlah Kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan Desa yang dikoordinasikan dan pendampingan	Porsea	2	kegiatan				57,913,570.00	DAU	
			Jumlah Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa yang difasilitasi dan dimonitoring	Porsea	200	Kegiatan	DAU		200		Kegiatan	
		Jumlah Rp.					6,857,028,045.00					6,967,410,909.00